

PARTISIPASI POLITIK REMAJA (PEMILIH PEMULA) PADA PEMILUKADA MOJOKERTO TAHUN 2010 DI DESA SUMBER TANGGUL KECAMATAN MOJOSARI KABUPATEN MOJOKERTO

Neny Agustin IrmaYuningsih

094254245 (PPKn, FIS, UNESA) kamal_kimil@yahoo.com

Warsono

0019056003 (PPKn, FIS, UNESA) warsonounesa@gmail.com

Abstrak

Demokrasi merupakan paham politik yang dianut pemerintah Indonesia. Pemilukada merupakan salah satu bentuk demokrasi yang dijalankan pemerintah daerah di Indonesia. Kabupaten Mojokerto sudah melaksanakan pemilukada pada tahun 2010. Desa Sumber Tanggul termasuk dalam kabupaten Mojokerto, terdapat 374 pemilih pemula. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih karena faktor usia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi politik dan faktor yang mendasari partisipasi politik pemilih pemula di desa Sumber Tanggul. Penelitian ini menggunakan metode *Ex Post Facto*. Penelitian ini dilaksanakan di desa Sumber Tanggul. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan wawancara. Analisis data dengan deskriptif kuantitatif. Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi politik pemilih pemula baik/tinggi yaitu sebesar 82%. Namun masih terdapat 18% pemilih pemula yang masih golput. Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik remaja (pemilih pemula) desa Sumber Tanggul tahun 2010 adalah faktor karakteristik seseorang. Hal ini ditunjukkan sebesar 69,20% memilih berdasarkan uang yang diberikan. Sedangkan 30,80% memilih tidak menerima uang dari tim sukses karena yakin pada pilihannya. Artinya, pemilih pemula termasuk pemilih yang pragmatis karena hanya demi uang mereka memilih calon bupati tersebut.

Kata kunci: Demokrasi, Pemilukada, Pemilih Pemula

Democracy is the political understanding adopted by Indonesian government . Local Election is a democratic form of government held in lower echelon of Indonesian goverment. Mojokerto district has implemented an it's own general election in 2010 . Sumber Tanggul village which included in Mojokerto district administrative area ,has 374 voters . New voters are first-time voters who choose for the first time due to age factors . The purpose of this study was to determine the level of political participation and factors affecting the political participation of voters in Sumber Tanggul village . This study used Ex Post Facto . The research was conducted in rural planning . Techniques of data collection used questionnaires and interviews . Data analysis done used quantitative descriptive analysis. Based on the data obtained it can be concluded that the level of political participation of first time voters good / high at 82 % . But there is still 18 % first time voters who didn't vote. Factors affecting the level of political participation of young voters (first time voters) in Sumber Tanggul village in 2010 was a person characteristic factors . This is indicated by 69.20 % choose based on money given to them . While 30.80 % chose not to receive money from a candidate campaign team because they confident in their choice . This is means first-time voters categorized to pragmatic voters because they vote for money to choose particular candidate.

Keyword: Democracy, Local Elections, Voters

Universitas Negeri Surabaya

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menjadikan demokrasi sebagai paham politik yang dianutnya, hal ini berlandaskan pada pembukaan UUD alinea ke 4. Pembukaan UUD 1945 tersebut terdapat kata kedaulatan rakyat yang artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* dan *cratos*, *demos* berarti rakyat dan *cratos* berarti pemerintahan. Menurut Abraham Lincoln (dalam Ngabiyanto 2003:42) demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga Negara Indonesia termasuk Negara yang berpaham demokrasi.

Demokrasi penting bagi setiap warga negara, agar tercipta negara yang demokratis. Sehingga perlu pembekalan sejak dini, salah satunya melalui pendidikan. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyebutkan, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Secara khusus “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan bahwa : “Pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berakhlak yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945”.

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mata pelajaran PKn memiliki tujuan untuk membangun karakter bangsa Indonesia, membentuk kecakapan partisipatif warga yang bermutu dan bertanggungjawab sebagai bangsa Indonesia. Menurut Kunawi (2011:10) pendidikan PKn bertujuan membentuk kecakapan yang partisipatif warga yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan warga Indonesia yang cerdas, aktif dan kreatif, dan demokratis namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa, serta mengembangkan kultur demokrasi yang beradab yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab.

Berlandaskan tujuan mata pelajaran PKn sebagai warga negara yang baik dan turut serta berperan aktif dalam pembangunan negara serta bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat ditunjukkan dengan cara ikut berpartisipasi dalam pemilu yang diselenggarakan oleh negara.

Demokrasi yang ditunjukkan oleh pemerintahan Indonesia dalam bentuk pembelajaran yang ada disekolah, pemerintahan Indonesia juga telah menyusun aturan-aturan yang mendukung jalan demokrasi dibuktikan dengan adanya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mengatur bentuk pemerintahan daerah yang sesuai dengan otonomi daerah salah satu amanat tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Konsekuensi dari adanya Pemilu maka rakyat memiliki peran yang nyata dalam rangka ikut menentukan nasib daerahnya dengan perluasan partisipasi politik yang bersifat progresif melalui Pemilu.

Pemilu langsung menjadi realitas politik yang berguna dalam membangun proses demokratisasi di tingkatan lokal. Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah kabupaten secara langsung menjadi langkah awal bagi masyarakat lokal dalam menata pemerintahan yang

transparan dengan legitimasi langsung dari rakyat. Maka partisipasi dari rakyat sangat diperlukan dalam melaksanakan pemilu secara langsung.

Partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, yang akhir-akhir ini terutama dalam hubungannya dengan negara-negara yang sedang berkembang pada saat ini. Partisipasi dapat berupa suatu dukungan yang datang dari berbagai pihak atau golongan. Partisipasi dapat datang dari rakyat yang sudah mendapatkan haknya untuk ikut serta dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

Hebert McClosky (dalam Budiardjo, 1994:183) “Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasaan dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum”.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (dalam Budiardjo 1994:184) “Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mengambil keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, secara damai atau kekerasan, legal atau tidak legal, dan efektif atau tidak efektif”.

Semua rakyat yang ikut serta dalam partisipasi ialah warga negara Indonesia yang sudah menginjak usia 17 tahun. Sebagai bagian dari komponen bangsa, pemuda tidak dapat melepaskan diri dan menghindari dari politik. Oleh karena hakekat manusia termasuk pemuda adalah *zoon politicon* atau mahluk politik. Keberadaan dan kiprah manusia termasuk pemuda merupakan bagian dari produk politik dan terlibat baik langsung maupun tidak langsung, nyata maupun tidak nyata dalam kehidupan politik.

Pemuda, sebagai *agent of change, moral force, iron stock* dan *social control* tentu memiliki kontribusi besar untuk mewujudkan kebangkitan bangsa. Ditambah lagi pemuda sekaligus kader intelektual untuk membangun bangsa yang nantinya akan menjabat sebagai pejabat-pejabat pemerintahan. Partisipasi dari para pemuda sangat diperlukan sebab pemuda sangat berperan aktif dalam menjalankan politik di negara ini.

Pesta demokrasi yaitu Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati di Mojokerto sudah dilaksanakan pada tahun 2010 silam. Masyarakat Mojokerto sudah menentukan pilihannya siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Mojokerto. Sudah biasa bagi para pemilih yang sudah pernah mengikuti Pemilu, namun lain halnya dengan para pemilih yang baru bisa memilih karena faktor umur yang belum cukup, mengingat pasal 1 ayat (22) UU No 10 tahun 2008 yang menuliskan : pemilih adalah

warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Negara demokrasi yang diterapkan pemerintah berbanding terbalik dengan realita yang berkembang di tingkat pusat dan daerah. Politik yang berkembang di Indonesia saat ini sedang mengalami kondisi yang kurang baik, dibuktikan dengan maraknya mafia kasus pelaku politik dipusat maupun daerah. Kondisi yang kurang baik ini dapat dilihat dari kasus yang melibatkan ketua umum partai demokrat. Partai demokrat merupakan partai yang cukup besar di Indonesia tetapi semenjak ketua umum partai demokrat “Anas Urbaningrum” ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi pembangunan fasilitas olah raga Hambalang Bogor, Jawa Barat. Kondisi yang kurang baik juga dapat dilihat pada kasus kisruhnya pemilukada yang terjadi di Mojokerto tahun 2010. Kerusuhan terjadi di depan gedung DPRD kabupaten Mojokerto. Kerusuhan ini dikarenakan para pendukung atau tim sukses bakal calon bupati yang tidak lolos verifikasi mengamuk dan membakar 23 mobil yang ada disekitar gedung DPRD.

Kerusuhan yang terjadi merupakan kerusuhan terbesar di Mojokerto dengan demonstran yang berdomisili di kecamatan Mojosari. Kecamatan Mojosari merupakan daerah asal bakal calon bupati yang tidak lolos verifikasi. Desa Sumber Tanggul merupakan bagian dari kecamatan Mojosari, tetapi remaja desa Sumber Tanggul tidak ikut serta dalam demo kerusuhan yang terjadi di depan gedung DPRD kabupaten Mojokerto. Maka hal inilah yang menarik untuk dikaji bagaimana partisipasi mereka dalam Pemilukada Mojokerto yang sudah diselenggarakan pada tahun 2010 silam mengingat sebelum diadakannya pemilukada sudah terjadi kekisruhan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang mendasari keinginan penulis untuk meneliti efek afektif (sikap) dan efek konasi (perilaku) yang timbul pada diri pemilih terhadap partai politik dan calon kepala daerah. Maka peneliti lebih lanjut meneliti tentang “Partisipasi Politik Remaja (Pemilih Pemula) pada Pemilukada Kabupaten Mojokerto tahun 2010 di Desa Sumber Tanggul Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto”. Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan, bagaimana tingkat partisipasi politik remaja (pemilih pemula) di desa Sumber Tanggul dan faktor apa yang mempengaruhi partisipasi politik remaja (pemilih pemula) di desa Sumber Tanggul?

Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata Yunani, yaitu *demos*, yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratein* atau *cratos*, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sedangkan menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa (Hidayat 2008:39).

Menurut Philippe C. Schmitter demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang terpilih. Sedangkan menurut Henry B. Mayo demokrasi sebagai suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Hidayat 2008:39).

Dari beberapa pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik. Dengan kata lain, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung tiga hal : pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*).

Tiga faktor utama yang dijadikan sebagai tolok ukur umum dari suatu pemerintahan yang demokratis, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.

Kedua, pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elite birokrasi. Selain pengertian ini, unsure kedua ini mengandung pengertian bahwa menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (*social control*). Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun

tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen. Dengan adanya pengawasan para wakil rakyat di parlemen ambisi otoritarianisme dari para penyelenggara negara dapat dihindari.

Ketiga, pemerintahan untuk rakyat (government for the people) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis.

Demi terciptanya proses demokrasi setelah terbentuknya sebuah pemerintahan demokratis. Pemerintah membuat saluran secara formal dan nonformal untuk menampung aspirasi dari rakyat. Saluran formal disini berupa, semua warga negara turut serta berpartisipasi politik dengan cara ikut dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan pemerintah berupa pemilu legislative, pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilu kasta. Artinya, rakyat berkewajiban untuk ikut serta dalam proses pemilihan karena semua nantinya akan dikembalikan lagi demi kepentingan rakyat. Selain saluran demokrasi formal lewat DPR dan partai politik, untuk mendapatkan masukan dan kritik dari warga negara dalam rangka terjadinya kontrol terhadap jalannya pemerintahan, pemerintah yang demokratis berkewajiban menyediakan dan menjaga saluran-saluran demokrasi nonformal bisa berupa penyediaan fasilitas-fasilitas umum atau ruang publik (*public sphere*) sebagai sarana interaksi sosial, seperti stasiun radio, televisi, taman, dan lain-lain. Sarana publik ini dapat digunakan oleh semua warga negara untuk menyalurkan pendapatnya secara bebas dan aman. Rasa aman dalam menyalurkan pendapat dan sikap harus dijamin oleh negara melalui undang-undang yang dijalankan oleh aparaturnya secara adil.

Partisipasi politik merupakan kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri. Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

Hebert McClosky (dalam Budiardjo, 1994:183) "Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasaan dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum".

Nie dan Verba (dalam Budiardjo, 1994:184) "Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga Negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka".

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (dalam Budiardjo 1994:184) "Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mengambil keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, secara damai atau kekerasan, legal atau tidak legal, dan efektif atau tidak efektif".

Partisipasi politik datang dari setiap warganegara yang mempunyai hak untuk memilih ataupun untuk dipilih. Warganegara yang berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu kasta ialah warganegara yang berusia 17 tahun atau lebih, sudah/pernah kawin. Warganegara yang berusia 17 tahun dikatakan sebagai remaja yang memiliki pengetahuan sangat minim mengenai politik. Maka ada istilah untuk remaja yang baru berusia 17 tahun dalam turut serta berpartisipasi dalam pemilu kasta, biasanya remaja ini sebut sebagai pemilih pemula atau orang yang baru turut serta berpartisipasi dalam ajang pesta demokrasi.

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan perbedaan jenis partisipasi tersebut menurut frekuensi dan intensitasnya. Menurut pengamatan, besar sekali jumlah orang yang mengikuti kegiatan yang tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan perkara sendiri, seperti memberi suara dalam pemilihan umum. Sebaliknya kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik, kegiatan politik mencakup antara lain menjadi pimpinan dari partai atau kelompok kepentingan.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (dalam Faturrohman 2002:190) membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi: (a) Kegiatan Pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu; (b) Lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu; (c) Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah; (d) *Contacting* – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan (e) Tindakan Kekerasan (*violence*) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah

huru-hara, teror, kudeta, pembutuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan.

Kelima bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau ilegal. Sebab itu, penyuaipan, ancaman, pemerasan, dan sejenisnya di tiap bentuk partisipasi politik adalah masuk ke dalam kajian ini.

Klasifikasi bentuk partisipasi politik Huntington dan Nelson relatif lengkap. Hampir setiap fenomena bentuk partisipasi politik kontemporer dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi mereka. Namun, Huntington dan Nelson tidak memasukkan bentuk-bentuk partisipasi politik seperti kegiatan diskusi politik, menikmati berita politik, atau lainnya yang berlangsung di dalam skala subyektif individu.

Pendapat itu diperkuat oleh Milbrath M.L. Goel dalam Faturrohmah (2002:191) yang mengidentifikasi tujuh bentuk partisipasi politik individual antara lain : (a) *Apathetic inactives* yaitu tidak beraktivitas yang partisipatif, tidak pernah memilih. (b) *Passive supporters* yaitu memilih secara regular atau teratur, menghadiri parade patriotik, membayar seluruh pajak, mencintai Negara. (c) *Contact specialist* yaitu pejabat penghubung local (daerah), propinsi dan nasional dalam masalah-masalah tertentu. (d) *Communicators* yaitu mengikuti informasi-informasi politik, terlibat dalam diskusi-diskusi, menulis surat dalam editor surat kabar, mengirim pesan-pesan dukungan dan protes terhadap pemimpin-pemimpin politik. (e) *Party and campaign workers* yaitu bekerja untuk partai politik atau kandidat, meyakinkan orang lain tentang bagaimana memilih, menghadiri pertemuan-pertemuan, menyumbang uang pada partai politik atau kandidat, bergabung dan mendukung partai politik, dipilih menjadi kandidat partai politik. (f) *Community activists* yaitu bekerja dengan orang lain berkaitan dengan masalah-masalah local, keanggotaan aktif dalam organisasi kemasyarakatan, melakukan kontak terhadap pejabat-pejabat berkenaan dengan isu-isu social. (g) *Protesters* yaitu bergabung dengan demonstrasi-demonstrasi public dijalanan, melakukan kerusuhan bila perlu, melakukan protes keras bila pemerintah melakukan sesuatu yang salah, menghadapi pertemuan-pertemuan protes, menolak mematuhi aturan-aturan.

Surbakti (1999:141) mengemukakan ada beberapa ciri-ciri kegiatan partisipasi politik, antara lain : (a) Partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. (b) Kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi

pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. (c) Kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. (d) Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. (e) Kegiatan langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara. Sedangkan kegiatan tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah. (f) Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional) dan tidak berupa kekerasan (*nonviolence*).

Lane menyatakan bahwa Partisipasi politik juga memiliki empat fungsi (Rush dan Althoff, 2000:181), yaitu: (a) Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis. (b) Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan penyesuaian social. (c) Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus. (d) Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bawah sadar dan psikologis tertentu.

Milbrath dan Goel dalam Surbakti (1999:143) membedakan partisipasi menjadi empat kategori yaitu: (a) *Apathetic*, apatis artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. (b) *Spectator*, spectator artinya orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. (c) *Gladiator*, gladiator artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat. (d) Pengkritik, pengkritik artinya dalam bentuk partisipasi tidak konvensional.

Olsen dalam Surbakti (1999:143) memandang partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi social. Beliau membagi partisipasi politik menjadi enam lapisan yaitu : (a) Pemimpin politik. (b) Aktivis politik. (c) Komunikator. (d) Warga Negara. (e) Marginal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem politik). (f) Orang yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik).

Pernyataan tersebut didukung oleh Cohen dan Uphoff (Susilo 2003:72) yang membagi partisipasi menjadi empat jenis yaitu : (a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan. (b) Partisipasi dalam pelaksanaan. (c) Partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. (d) Partisipasi dalam evaluasi

Berdasarkan tinggi rendahnya, Paige dalam Surbakti (1999:144) membagi partisipasi menjadi empat tipe yaitu: (a) Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif. (b) Apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politik cenderung pasif tertekan (apatis). (c) Militeran radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggi

tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. (d) Apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).

Sedangkan menurut Roth (Budiardjo 2007:189) mengemukakan terdapat tiga tingkatan partisipasi politik antara lain : (a) Aktivis, meliputi : (1) Pembunuh politik, pembajak, teroris (menyimpang). (2) Pejabat umum, pejabat partai sepenuh waktu, pimpinan kelompok kepentingan. (b) Partisipan, meliputi : (1) Petugas kampanye aktif dalam partai/ kelompok kepentingan. (2) Petugas kampanye aktif dalam proyek-proyek social. (c) Pengamat, meliputi : (1) Menghadiri rapat umum, anggota kelompok kepentingan, usaha meyakinkan orang, memberikan suara dalam pemilu, mendiskusikan masalah politik dan perhatian pada perkembangan politik. (2) Orang yang apolitis.

Wan Usman mendefinisikan pemilih sebagai seorang yang dengan suka rela menyumbangkan suaranya. Pemilih disini dibagi menjadi: (1) pemilih sukarela tanpa termobilisasi yaitu pemilih yang tanpa paksaan bersedia memberikan hak pilihnya kepada Negara. (2) pemilih sukarela yang termobilisasi. Pemilih jenis ini meskipun memberikan suaranya pada pemilu, namun pada dasarnya niatnya tidak tulus, ada sebab-sebab yang mendasari mereka melakukan hal tersebut. Sebab-sebab itu bisa berupa dukungan fanatik atau adanya praktek money politik (Wan Usman 1997:54).

Ada atau tidaknya partisipasi politik masyarakat menurut Jalbi, dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yakni (1) Partisipan, atau orang-orang yang aktif berpolitik. Inilah bentuk konkret partisipasi aktif. (2) Non Partisipan politik. Inilah bentuk konkret yang tidak berpartisipasi. Mereka tidak berada pada satu tingkat, akan tetapi dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, orang-orang yang memang tidak berusaha untuk berpartisipasi, seperti orang-orang yang sudah terbiasa tidak menggunakan hak suara mereka. Misalnya, ketidakpedulian ini semakin besar pada sebagian tokoh agama yang memiliki pemahaman sempit akan agamanya, dan sebagian mereka beranggapan bahwa ketidakpedulian politik merupakan nilai, seperti kaum perempuan pada sebagian masyarakat (Ruslan 2000:105).

Kelompok kedua, orang-orang yang meremehkan urusan politik. Bentuk konkret sikap ini dapat di lihat pada tiga fenomena yaitu (1) Ketidakpedulian politik. Yaitu tidak memberikan perhatian terhadap segala yang terjadi di dalam masyarakat pada umumnya, atau pada sebagiannya. Dampaknya, yang ada hanya kepatuhan kepada segala yang datang dari penguasa. Ini terjadi mungkin akibat ketidakmampuan individu untuk memikul tanggung jawab, atau akibat rasa takut dan tidak

aman. (2). Keraguan politik. Yaitu ketidakpercayaan seseorang terhadap sikap dan perkataan para politikus, serta perasaan bahwa aktivitas polituik adalah pekerjaan buruk (3). Keterasingan politik. Yaitu perasaan asing yang dirasakan oleh individu terhadap pemerintah dan sistem politik masyarakatnya, dan keyakinan bahwa pemerintah dan garis politiknya dijalankan oleh orang lain untuk kepentingannya sendiri dengan kaidah-kaidah yang tidak adil, serta munculnya perasaan bahwa kekuasaan bukanlah urusannya. Ia bukanlah apa-apa. Karena itu, lenyaplah semangat dan motivasinya untuk berpartisipasi (Ruslan 2000:105).

Dorongan-dorongan positif yang mengantarkan seseorang kepada aktivitas politik dapat berwujud melalui : (1) Media-media komunikasi politik, seperti membaca koran dan diskusi-diskusi. (2) Propaganda politik dan berbagai upaya untuk mengubah orientasi, terkadang mendorong masyarakat untuk ikut tenggelam dalam partisipasi tersebut. (3) Perasaan individu bahwa partisipasi politik itu suatu keharusan, lalu tumbuhlah kecenderungan kepada politik. Hal ini biasanya menyebabkan individu berkembang wawasan politiknya dan ikut andil dalam persaingan politik, sehingga mendorongnya untuk bergabung kepada partai atau kelompok politik tertentu, atau mencalonkan diri dalam pemilihan umum. (4) Partisipasi politik juga tergantung kepada tingkat kemampuan dan kecakapan yang dimiliki individu misalnya kemampuan untuk memikul tanggung jawab, mengambil keputusan, kemampuan untuk memilih dan berkesadaran politik yang kritis, juga berorientasi kepada pelayanan lingkungan dan minat memecahkan problematikanya. (5) Keyakinan individu akan kemampuannya dalam memengaruhi keputusan-keputusan pemerintah merupakan dorongan psikologis untuk berpartisipasi (Ruslan, 2000:102-103).

Pendapat di atas juga diperkuat oleh Jalbi (Ruslan 2000:101-102) bahwa partisipasi politik warga negara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : (1) Keyakinan agama yang diimani oleh individu. Sebagai contoh Islam mendorong pemeluknya untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemunkaran, mengkritik dan mengawasi penguasa, dan seterusnya. Ini merupakan dorongan internal dalam melakukan partisipasi politik. Faktor jenis individu: laki-laki atau perempuan, juga berpengaruh besar terhadap partisipasi politik di sebagian masyarakat. Demikian juga taraf pendidikan. Semua itu sering disebut sebagai faktor-faktor sosial. (2) Jenis kultur politik, atau bentuk nilai dan keyakinan tentang kegiatan politik yang mempengaruhinya. Terkadang kultur politik mendorong seseorang untuk berpartisipasi secara aktif, tetapi terkadang justru menjadikan seseorang buta politik. (3) Karakter lingkungan politik. Dalam masyarakat yang

menghormati supremasi hukum dan kebebasan politik, sistem politiknya bersifat multipartai, mengakui hak kritik dan partisipasi rakyat, dan banyak memberi kesempatan kepada anggota masyarakatnya untuk melakukan partisipasi dalam kehidupan bernegara. Demikian pula, keberadaan partai-partai dengan segala ragamnya, juga berarti jaminan atas adanya oposisi yang institusional yang dengannya mereka melakukan partisipasi politik dan ikut mengambil keputusan. Artinya, ideologi dan sistem politik masyarakat memberikan pengaruh besar kepada partisipasi warganya.

Weber mengemukakan bahwa partisipasi politik dapat dilakukan atas dorongan-dorongan yang ada pada seseorang yang didasari oleh motif-motif sebagai berikut: (1) Rasional bernilai, yaitu didasarkan pada penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok. (2) Efektual dan emosional, didasarkan atas kebencian atau entusiasme terhadap suatu ide, organisasi, atau individu. (3) Tradisional, didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu dari suatu kelompok social (Rush 2000:181)

Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama pemilih rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia memilih.

Menurut pasal 1 ayat (22) UU No 10 tahun 2008, pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17(tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat(1 dan 2) UU No. 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17(tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia memilih yaitu 17 hingga 21 tahun. Pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya, yang membedakan adalah soal antusiasme dan preferensi. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah: (1) WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. (2) Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. (3) Terdaftar sebagai pemilih. (3) Bukan anggota TNI/Polri (Purnawirawan / Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI / Kepolisian). (4) Tidak sedang dicabut hak pilihnya. (5) Terdaftar di DPT. (6) Khusus untuk Pemilukada calon

pemilih harus berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di daerah yang bersangkutan.

Pengertian Pemilukada ialah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat daerah tersebut untuk memilih kepala daerahnya yang baru atau Pemilihan Kepala Daerah baik untuk tingkatan Gubernur, Bupati, Walikota serta para wakilnya di tentukan oleh adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat yang berasaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilukada (*Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*) sudah terjadi di ratusan tempat di seluruh Indonesia.

Dalam UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pasal 1 angka 4 yang menyebutkan “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Menurut UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 58 menyebutkan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: (a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (b) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah. (c) Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat. (d) Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. (e) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter. (f) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (g) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (h) Mengetahui daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. (i) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan. (j) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. (k) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (l) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak. (m) Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri. (n) Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. (o) Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah. (q) Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode *Ex Post Facto*. Penelitian *Ex Post Facto* adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang terjadi dan kemudian melihat ke belakang untuk mengenai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut (Sugiyono, 1999:7). Alasan menggunakan metode *Ex Post Facto* adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik remaja (pemilih pemula) di desa Sumber Tanggul kecamatan Mojosari kabupaten Mojokerto pada pemilu pada kabupaten Mojokerto tahun 2010. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah suatu penelitian yang didasarkan pada data yang ada atau penyelidikan yang bertujuan pada pemecahan masalah (Winarno, 2002:175). Alasan menggunakan pendekatan deskriptif adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi politik remaja (pemilih pemula) di desa Sumber Tanggul kecamatan Mojosari kabupaten Mojokerto pada pemilu pada kabupaten Mojokerto tahun 2010.

Tempat penelitian adalah daerah atau lokasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian. Adapun tempat yang digunakan untuk penelitian ini adalah di desa Sumber Tanggul. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena didasari oleh suatu pertimbangan yakni remaja desa Sumber Tanggul tidak ikut dalam kerusuhan yang terjadi di depan kantor DPRD kabupaten Mojokerto.

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh remaja yang berusia 17-21 tahun atau sudah pernah menikah yang berjumlah 374 orang. Dan sampel pada penelitian ini berjumlah 82 orang yang dihitung menggunakan rumus dari Slovin. Teknik pengambilan sampel menggunakan *cluster random sampling*. Penggunaan *cluster random sampling* karena populasi dibagi dalam dusun-dusun. Ada 5 dusun di Desa Sumbertanggul, yakni Dusun Sumbertanggul, Dusun Sumberjo, Dusun Wonokoyo, Dusun Wonosari dan Dusun Glogok.

Variabel pada penelitian ini adalah tingkat partisipasi politik pemilih pemula. Definisi operasional variabel

pada penelitian ini ialah Tingkat partisipasi politik pemilih pemula adalah keikutsertaan warga Negara Indonesia yang berusia 17-21 tahun yang menggunakan hak pilih dalam pemilu pada kabupaten Mojokerto tahun 2010.

Teknik pengumpulan data ini terdiri dari teknik pengumpulan data utama dan teknik pengumpulan data penunjang. Teknik pengumpulan data utama adalah peneliti sendiri sedangkan teknik pengumpulan data penunjang adalah menggunakan angket tertutup.

Angket merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden) yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh responden (Sukmadinata, 2010:219).

Angket tertutup adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan yang sudah disediakan jawabannya, responden hanya memilih salah satu dari jawaban yang tersedia untuk diisi. Angket ini ditujukan kepada remaja (pemilih pemula) yang ada di desa Sumber Tanggul kecamatan Mojosari kabupaten Mojokerto untuk mendapatkan data tentang tingkat partisipasi remaja (pemilih pemula) pada pemilu pada kabupaten Mojokerto tahun 2010. Angket ditujukan untuk mengumpulkan data guna menjawab rumusan masalah yang pertama.

Wawancara, menurut Lexy J Moleong (1991:135) adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Fungsi dari wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik remaja (pemilih pemula) pada pemilu pada kabupaten Mojokerto tahun 2010. Wawancara ditujukan untuk mengumpulkan data penunjang dalam menjawab rumusan masalah yang kedua. Perpaduan beberapa teknik pengumpulan data tersebut, peneliti mengharapkan data yang representatif serta memiliki validitas dan reliabilitas yang baik.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif dengan prosentase melalui tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian deskriptif. Menggunakan rumus:

$$P = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Skor Prosentase

n = Skor Jawaban Responden

N = Skor Maksimal

Penggunaan teknik prosentase partisipasi untuk menunjukkan seberapa tinggi tingkat partisipasi remaja pada pemilu pada kabupaten Mojokerto di Desa Sumber

Tanggul sehingga dapat tercipta suatu partisipasi yang berkualitas dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten Mojokerto. Pemilihan teknik tersebut disesuaikan dengan jenis penelitian untuk mengungkap seberapa besar prosentase hasil penelitian. Teknik ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang pertama.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis data ini adalah: (1) Membuat tabulasi jawaban responden berdasarkan pertanyaan dari angket. (2) Tabel jawaban responden dibagi sesuai dengan indikator. (3) Tabel dari jawaban responden dihitung menggunakan perhitungan prosentase keseluruhan. (4) Dari data yang disajikan, akan dianalisis menggunakan deskriptif kuantitatif dengan memprosentasekan hasil jawaban dari responden.

Dalam perhitungan terhadap prosentase tersebut, kriteria yang digunakan dalam analisis data sebagai berikut:

Tabel 1. Rubrik Penilaian

No	Jawaban	Skor
1.	Ya/ Pernah	3
2.	Tidak/ Tidak Pernah	1

Setelah penentuan skor atas jawaban dari angket responden, maka penentuan kriteria penilaiannya sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Tingkat Partisipasi (Purwanto, 2010:103)

No	Range	Kualitas
1	86 - 100%	Sangat Baik
2	76 - 85 %	Baik
3	60 - 75 %	Cukup
4	55 - 59 %	Kurang
5	≤ 54%	Kurang Sekali

Kriteria penelitian ini sebagai pengkategorian dari hasil skor yang akan digunakan sebagai tolak ukur dalam hasil penelitian tentang masalah yang diteliti. Dengan menggunakan teknik ini, dimana hasilnya berupa skor, maka akan dapat menggambarkan keadaan sampel dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sehingga dapat menjelaskan keadaan yang sebenarnya dari suatu populasi. Tindakan mengambil kesimpulan adalah sebagai cara untuk memperoleh kepastian akan kebenaran dari suatu penelitian yang berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data. Dengan menarik kesimpulan, berarti akan memberi jawaban tentang benar atau tidaknya dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua menggunakan teknik *Ex Post Facto*. Penggunaan teknik

Ex Post Facto untuk menguraikan factor-faktor yang dapat mempengaruhi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilukada kabupaten Mojokerto tahun 2010 di desa Sumber Tanggul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum lokasi penelitian

Desa Sumbertanggul merupakan bagian dari desa multikultural yang ada di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Desa Sumbertanggul terdiri dari 5 dusun yakni Dusun Sumbertanggul, Dusun Sumberjo, Dusun Wonokoyo, Dusun Wonosari dan Dusun Glogok. Desa dengan luas wilayah 229,014 ha ini berbatasan dengan:

Utara : Desa Kebondalem
 Selatan : Desa Sumberkembar
 Barat : Desa Pekukuhan
 Timur : Desa Belahan Tengah

Jumlah penduduknya sebesar 4.208 jiwa (Tertanggal 5 Desember 2011) terdiri dari agama islam berjumlah 4.126 jiwa, agama Hindu berjumlah 68 jiwa, dan agama lain berjumlah 14 jiwa. Multikultural yang menjadi karakteristik dari Desa Sumbertanggul adalah dinobatkannya sebagai Desa yang mempunyai jumlah pemeluk agama hindu terbesar di Kabupaten Mojokerto.

Desa Sumbertanggul terletak 6 km dari Mojosari, merupakan suatu wilayah strategis yang menjadi jalan alternatif menuju Mojosari ketika jalur Ranggon-Mojosari ditutup untuk *car free day*. Kondisi tanahnya subur dan sangat sesuai digunakan untuk bertani beras, jagung, dan sebagainya. Mata pencaharian masyarakat Sumbertanggul mayoritas sebagai petani. Berikut data yang sudah masuk di KPUD Mojokerto mengenai jumlah pemilih di desa Sumber Tanggul.

Table 3. Jumlah Pemilih

Pemilih Keseluruhan		Pemilih Pemula (17-21 Tahun)	
3248 Pemilih		374 Pemilih	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1607	1641	183	191

Data hasil penelitian tentang tingkat partisipasi politik remaja (pemilih pemula) pada pemilukada Mojokerto tahun 2010 di desa Sumber Tanggul

Berdasarkan data angket yang dihasilkan melalui penelitian, diperoleh gambaran adanya faktor yang mempengaruhi partisipasi politik remaja pada pemilukada Mojokerto tahun 2010 desa Sumber Tanggul yang meliputi tentang :

Data hasil penelitian tentang tingkat partisipasi politik (pemilih pemula) pada pemilukada Mojokerto

2010 di desa Sumber Tanggul diperoleh dengan angket no 1.

Tabel 4. Keikutsertaan pada saat pemilu pada

Indikator	Jawaban			
	Ya		Tidak	
	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
Ikut serta pada saat dilakukan pencoblosan	82	82%	18	18%

Tabel diatas merupakan distribusi jawaban yang diperoleh dari responden dengan item pertanyaan dalam bentuk angket dengan tujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi politik remaja (pemilih pemula) di desa Sumber Tanggul pada pemilu pada Mojokerto tahun 2010 melalui item ikut serta secara langsung pada saat diselenggarakannya pemilu pada.

Responden yang dipilih untuk menjawab item pertanyaan angket ini adalah remaja desa Sumber Tanggul yang telah ditentukan sebagai sampel penelitian berjumlah 100 orang yang tersebar dalam 5 dusun. Dari pertanyaan nomor 1 dengan pertanyaan “Apakah pada pemilu pada kabupaten Mojokerto tahun 2010 Anda ikut berpartisipasi dengan menconteng kertas surat suara” sebanyak 82% orang menyatakan ya. Sedangkan 18% menyatakan tidak. Artinya bahwa remaja desa Sumber Tanggul berperan aktif dalam memberikan suaranya secara langsung dalam pemilu pada Mojokerto tahun 2010. Hal ini dapat dibuktikan bahwa 82% remaja memberikan suaranya secara langsung sedangkan 12% remaja memilih untuk golput.

Faktor yang mendasari partisipasi politik remaja (pemilih pemula) pada pemilu pada Mojokerto tahun 2010 di desa Sumber Tanggul

Tanggapan pribadi dalam pemilu pada

Tabel 5 . Tanggapan pribadi dalam pemilu pada

Indikator	Jawaban	
	Jumlah	Prosentase
Berpartisipasi dalam pemilu pada tahun 2010 merupakan suatu kewajiban	66	80,48%
Suara remaja memiliki peranan penting dalam pemilu pada tahun 2010	58	70,74%
Suara remaja dapat mengkritik dan mengubah kebijakan pemerintah	18	21,95%

Memberikan suara pada saat pemilu pada kabupaten Mojokerto tahun 2010 diselenggarakan merupakan hal yang penting	69	84,15%
memilih pasangan calon Bupati karena keyakinan Anda sendiri, bukan karena pengaruh orang lain	60	73,17%
Rata-rata	54	66,09%

Tabel diatas merupakan distribusi jawaban yang diperoleh dari responden atas sejumlah item pertanyaan yang telah diberikan dalam bentuk angket dengan tujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi politik remaja (pemilih pemula) pada pemilu pada Mojokerto tahun 2010 di desa Sumber Tanggul melalui faktor karakteristik pribadi. Responden yang dipilih untuk menjawab item pernyataan angket ini adalah remaja desa Sumber tanggul dengan usia 17-21 tahun yang telah ditentukan sebagai sampel penelitian berjumlah 82 orang yang tersebar dalam 5 dusun yang berbeda tetapi tetap dalam satu desa. Dalam tabel tersebut diperoleh rata-rata prosentase sebesar 66,09% menjawab ya. Artinya tanggapan pribadi dalam pemilu pada dapat dikategorikan kedalam memilih rasional.

Pemilih rasional merupakan pemilih yang benar-benar memilih berdasarkan penilaian, analisis mendalam, serta pemilih yang masih idealis dan tak kenal kompromi. Remaja desa Sumber Tanggul memiliki prosentase yang rendah. Remaja desa Sumber Tanggul masih belum dapat menilai calon pemimpin yang pantas menurut keyakinannya sendiri melainkan banyak pemuda yang masih goyah dalam menentukan pilihannya. Hal ini berdasarkan prosentase yang diperoleh dari jawaban angket sebanyak 66,09% menyatakan memilih calon bupati berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Sedangkan selebihnya menyatakan memilih calon bupati karena ikut-ikutan dengan yang lain.

Ketertarikan mengikuti informasi pemilu pada

Tabel 6. Ketertarikan mengikuti informasi pemilu pada

Indikator	Jawaban	
	Jumlah	Prosentase
Mengikuti informasi tentang diselenggarakannya pemilu pada tahun 2010	75	91,46%
Memahami tujuan dipublikasikannya	69	84,14%

informasi pemilukada melalui berbagai media		
Informasi politik tersebut mendorong Anda untuk aktif dalam dunia politik atau aktif berpartisipasi pada saat pemilukada diselenggarakan	67	81,70%
Kegiatan yang Anda lakukan pada saat berdemo bersifat rusuh atau seenaknya sendiri	17	20,73%
Ajaran agama Anda juga menyerukan untuk aktif dalam kegiatan pemilihan Bupati	14	17,07%
Rata-rata	48,4	59,02%

Tabel diatas merupakan distribusi jawaban yang diperoleh dari responden atas sejumlah item pertanyaan yang telah diberikan dalam bentuk angket dengan tujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi politik remaja (pemilih pemula) pada pemilukada Mojokerto tahun 2010 di desa Sumber Tanggul melalui faktor keadaan politik. Responden yang dipilih untuk menjawab item pernyataan angket ini adalah remaja desa Sumber tanggul dengan usia 17-21 tahun yang telah ditentukan sebagai sampel penelitian berjumlah 82 orang yang tersebar dalam 5 dusun yang berbeda tetapi tetap dalam satu desa. Dalam tabel tersebut diperoleh rata-rata prosentase sebesar 59,02% menjawab ya. Artinya ketertarikan mengikuti informasi pemilukada dapat dikategorikan kedalam pemilih pragmatis.

Pemilih pragmatis merupakan pemilih yang memilih berdasarkan jumlah uang yang diberikan, tetapi keadaan politik juga dapat dikategorikan dalam pemilih pragmatis. Hal ini dikarenakan keadaan politik dapat mempengaruhi seorang pemilih dalam menentukan pilihannya pada calon bupati Mojokerto. Remaja desa Sumber Tanggul memiliki prosentase yang tinggi. Remaja desa Sumber Tanggul masih belum dapat menilai calon pemimpin yang pantas menurut keyakinannya sendiri melainkan dari keadaan politik yang ada di Mojokerto. Keadaan politik ini dapat dilihat dari informasi yang didapat oleh para remaja melalui tv lokal, radio maupun koran. Hal ini berdasarkan prosentase yang diperoleh dari jawaban angket sebanyak 59,02% menyatakan memilih calon bupati berdasarkan keadaan politik yang ada. Sedangkan selebihnya menyatakan memilih calon bupati karena analisis.

Sejauh mana orang menerima perangsangan politik

Tabel 7 . Sejauh mana orang menerima perangsangan politik

Indikator	Jawaban	
	Jumlah	Prosentase
Pernah mengikuti kampanye politik untuk mendukung partai politik tertentu	70	85,36%
Pernah mengikuti demo untuk mengkritik kebijakan pemerintah	11	13,41%
Memilih pasangan calon Bupati karena kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diberikan	60	73,17%
Memilih pasangan calon Bupati karena partai yang Anda yakini	42	51,22%
Rata-rata	45,75	55,79%

Tabel diatas merupakan distribusi jawaban yang diperoleh dari responden atas sejumlah item pertanyaan yang telah diberikan dalam bentuk angket dengan tujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi politik remaja (pemilih pemula) pada pemilukada Mojokerto tahun 2010 di desa Sumber Tanggul melalui faktor karakteristik sejauh mana orang menerima perangsangan politik. Responden yang dipilih untuk menjawab item pernyataan angket ini adalah remaja desa Sumber tanggul dengan usia 17-21 tahun yang telah ditentukan sebagai sampel penelitian berjumlah 82 orang yang tersebar dalam 5 dusun yang berbeda tetapi tetap dalam satu desa. Dalam tabel tersebut diperoleh rata-rata prosentase sebesar 55,79% menjawab. Artinya sejauh mana orang menerima perangsangan politik dapat dikategorikan kedalam pemilih emosional.

Pemilih emosional merupakan pemilih yang mengikuti partai politik yang diyakini, karena adanya ikatan ideologi dari partai politik tersebut. Remaja desa Sumber Tanggul memiliki prosentase yang tinggi. Remaja desa Sumber Tanggul sudah dapat menyerap perangsangan politik yang diberikan oleh tim sukses masing-masing calon bupati. Hal ini berdasarkan prosentase yang diperoleh dari jawaban angket sebanyak 55,79% menyatakan dapat menerima rangsangan politik dari tim sukses calon bupati dengan baik. Sedangkan selebihnya menyatakan belum dapat menerima perangsangan politik dari tim sukses bupati dengan baik.

Karakteristik sosial seseorang

Tabel 8. Karakteristik sosial seseorang

Indikator	Jawaban	
	Ya	
	Jumlah	Prosentase
Mengikuti kampanye-kampanye politik untuk kepentingan pribadi seperti mendapatkan uang, jabatan, dan lain-lain	39	47,57%
Pernah mendapatkan sesuatu dari calon Bupati seperti kaos bergambar, kalender, aksesoris, dan lain-lain dari tim sukses pemilu pada tahun 2010	69	84,14%
Pembagian sesuatu dari calon Bupati seperti kaos bergambar, kalender, aksesoris, dan lain-lain tersebut dapat mendorong Anda untuk berpartisipasi dalam pemilu pada tahun 2010	57	69,51%
Memilih pasangan calon Bupati hanya karena uang yang diberikan	62	75,60%
Rata-rata	56,75	69,20%

Tabel diatas merupakan distribusi jawaban yang diperoleh dari responden atas sejumlah item pertanyaan yang telah diberikan dalam bentuk angket dengan tujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi politik remaja (pemilih pemula) pada pemilu pada Mojokerto tahun 2010 di desa Sumber Tanggul melalui faktor karakteristik sosial seseorang. Responden yang dipilih untuk menjawab item pernyataan angket ini adalah remaja desa Sumber tanggul dengan usia 17-21 tahun yang telah ditentukan sebagai sampel penelitian berjumlah 82 orang yang tersebar dalam 5 dusun yang berbeda tetapi tetap dalam satu desa. Dalam tabel tersebut diperoleh rata-rata prosentase sebesar 69,20% menjawab ya. Artinya karakteristik sosial seseorang dapat dikategorikan kedalam pemilih pragmatis.

Pemilih pragmatis merupakan pemilih yang hanya memilih berdasarkan jumlah uang yang diberikan. Remaja desa Sumber Tanggul memiliki prosentase yang sangat tinggi dari empat faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Remaja desa Sumber Tanggul akan memilih calon bupati apabila tim sukses dari calon bupati tersebut memberikan uang banyak. Hal ini berdasarkan prosentase yang diperoleh dari jawaban angket sebanyak 69,20% menyatakan memilih calon bupati berdasarkan jumlah uang yang diberikan. Sedangkan selebihnya

menyatakan memilih calon bupati tidak berdasarkan uang yang diberikan.

Wawancara

Data hasil wawancara dalam rumusan masalah faktor yang mempengaruhi tingkat politik remaja (pemilih pemula) pada pemilu pada Kabupaten Mojokerto di desa Sumber Tanggul Kec. Mojosari Kab. Mojokerto ini diambil dari sebagian para remaja yang telah mengisi angket. Data hasil wawancara ini digunakan sebagai data pendukung dari angket yang dibagikan pada remaja. Secara rinci data hasil wawancara dapat dijelaskan pada tabel 4.38 sebagai berikut :

Tabel 9. Hasil wawancara pada responden

No	Nama Responden	Hasil wawancara
1	Moh. Amry Syaifudhin, 19 tahun	“Saya memilih bupati karena mengikuti orang disekitar saya dan ada dorongan dari orang lain. Saya kurang begitu yakin dengan bupati yang saya pilih tapi karena ada imbalan yang berikan maka saya memilih calon bupati tersebut. Imbalan yang saya terima berupa sejumlah uang, saya menerima uang itu karena saya tergiur dengan jumlah uang yang diberikan. Selain itu tidak ada salahnya kalau hanya dengan mencoblos saya mendapatkan uang dengan cuma-cuma. Saya juga memahami kenapa tim sukses memberikan uang tersebut, hal itu karena agar saya mencoblos calon bupati yang dimaksud oleh tim sukses. Dengan saya mencoblos calon bupati tersebut maka calon bupati itu menjadi bupati Mojokerto periode 2010-2015. Saya juga pernah mendapatkan sejumlah aksesoris berupa pin, kaos dan topi dari tim sukses calon bupati tersebut”.
2	Didik Suprayitno, 20 tahun	“Saya memilih bupati karena ada dorongan dari orang lain yaitu tim sukses calon bupati tersebut. Tapi saya yakin pada calon bupati yang salah pilih, karena bupati tersebut memberikan bantuan kepada desa ini pada saat kampanye. Bantuan

3	Mega Dwi Lestari, 18 tahun	tersebut berupa perbaikan jalan ke makam yang semakin bagus. Selain membangun fasilitas desa tim sukses calon bupati juga memberikan sejumlah uang kepada saya. Saya menerima uang tersebut karena teman-teman saya juga menerimanya. Tim sukses calon bupati memberikan uang pada saya agar saya memilih calon bupati tersebut. Selain sejumlah uang yang saya terima saya juga mendapat kaos dari tim sukses calon bupati”. “Saya memilih calon bupati karena saya yakin pada calon bupati tersebut. Saya yakin karena pada saat kampanye di desa bupati tersebut memberikan janji-janji untuk memajukan desa. Selain itu saya memilih calon bupati tersebut juga karena sosok calon bupati yang begitu memukau pada saat berkampanye dan saya juga menerima kaos dari tim sukses. Tapi pada saat hari H pencoblosan saya diberikan amplop dan amplop tersebut berisi sejumlah uang. Saya paham mengapa tim sukses memberikan sejumlah uang itu, agar saya memilih calon bupati tersebut. Saya menerima uang tersebut karena saya tergiur dengan jumlah uang yang diberikan”.
---	----------------------------	---

Mojokerto. Hal ini ditunjukkan dengan prosentase sebesar 85,76% mengikuti informasi mengenai pemilukada. Namun, masih ada 14,24% orang yang kurang mengikuti informasi mengenai perkembangan pemilukada.

Berdasarkan indikator pendidikan politik, tingkat partisipasi politik remaja (pemilih pemula) desa Sumber Tanggul pada pemilukada Mojokerto 2010 ini tergolong tinggi. Hal ini ditunjukkan bahwa remaja cukup berperan untuk mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang diberikan disekolah maupun di desa oleh anggota KPU desa. Hal ini ditunjukkan dengan prosentase sebesar 58,28% mengikuti penyuluhan yang dilakukan anggota KPU desa. Namun terdapat 41,72% remaja yang tidak mengikuti penyuluhan, karena penyuluhan yang dilakukan oleh petugas KPU desa kurang maksimal.

Berdasarkan indikator kampanye politik menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik remaja (pemilih pemula) desa Sumber Tanggul pada pemilukada Mojokerto 2010 adalah rendah. Remaja merasa bahwa kampanye yang dilakukan oleh para calon bupati hanya memberika janji belaka pada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan prosentase sebesar 36,93% mengikuti kampanye. Namun, dalam indikator ini masih ada sekitar 63,07% remaja yang tidak ikut secara langsung dalam kampanye tersebut karena menurut mereka kampanye hanya untuk mencari simpati masyarakat saja bukan untuk memberikan perubahan yang layak bagi Mojokerto.

Berdasarkan indikator ikut serta dalam pemilukada tingkat partisipasi politik remaja (pemilih pemula) desa Sumber Tanggul pada pemilukada Mojokerto 2010 ini adalah cukup tinggi. Para remaja menyadari bahwa dengan memberikan suara/mencontreng dapat mengubah demokrasi yang ada Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan prosentase sebesar 82% mencoblos secara langsung. Namun, dalam indikator ini masih ada sekitar 18% remaja yang golput .

Selanjutnya berdasarkan konsep partisipasi politik menurut Milbrath M.L Goel, partisipasi politik merupakan kegiatan pribadi warga negara yang legal dan bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang akan diambil oleh mereka. Milbrath juga mengklasifikasikan partisipasi politik menjadi 4 tipe, yaitu: partisipasi politik aktif, partisipasi politik pasif tertekan (apatis), partisipasi politik militan radikal, dan partisipasi politik pasif. Dalam hal ini tingkat partisipasi politik aktif berperan baik/tinggi, sebab remaja desa Sumber Tanggul turut serta dalam pencoblosan langsung dengan prosentase yang dimiliki sebesar 82% dari 100 sampel yang telah ditentukan.

PEMBAHASAN

Tingkat partisipasi politik remaja (pemilih pemula) di desa Sumber Tanggul pada pemilukada Mojokerto tahun 2010

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa tingkat partisipasi politik remaja (pemilih pemula) di desa Sumber Tanggul sangat tinggi. Wujud partisipasi politik yang dimiliki ini meliputi informasi politik, pendidikan politik, kampanye politik, ikut serta dalam pemilukada dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik.

Berdasarkan indikator mengenai informasi politik tingkat partisipasi remaja pada indikator ini tergolong tinggi. Karena remaja mau mengikuti informasi yang berkembang melalui media masa, seperti tv, koran, radio untuk dapat menentukan pilihannya akan diberikan kepada calon bupati yang pantas dalam memimpin

Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik remaja (pemilih pemula) di desa Sumber Tanggul pada pemilu pada Mojokerto 2010

Berdasarkan hasil penelitian angket dan wawancara sebagai data pendukung di peroleh bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik remaja (pemilih pemula) di desa Sumber Tanggul pada pemilu pada Mojokerto 2010 sebesar 69,20% terdapat pada faktor karakteristik sosial seseorang yang termasuk dalam kategori memilih pragmatis.

Berdasarkan teori Milbrath tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik individual. Keadaan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih nyaman dan bebas untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik itu sendiri. Dari keempat faktor sudah dipaparkan mengenai faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik remaja, faktor karakteristik sosial seseorang yang memperoleh prosentase tertinggi. Hal ini ditunjukkan sebesar 69,20% memilih bahwa untuk menentukan bupati dilihat dari seberapa banyak tim sukses memberikan uang. Selain itu, fasilitas yang ada di desa juga diperbaiki sebagaimana mestinya. Sedangkan 30,80% memilih tidak menerima uang dari tim sukses karena yakin pada pilihannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Tingkat partisipasi politik remaja (pemilih pemula) desa Sumber Tanggul pada pemilu pada Mojokerto 2010 dilihat dari item keikutsertaan remaja dalam mencoblos/memberikan suara secara langsung tergolong baik/tinggi sebesar 82%. Namun masih terdapat remaja yang golput sebesar 18%. Dalam hal ini tingkat partisipasi politik aktif, sebab dilihat dari jumlah responden hanya 18% remaja yang golput. Remaja desa Sumber Tanggul memberikan suara secara langsung merupakan sebuah kewajiban sebagai warganegara Indonesia yang baik.

Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik remaja (pemilih pemula) desa Sumber Tanggul tahun 2010 adalah faktor karakteristik seseorang. Hal ini ditunjukkan sebesar 69,20% memilih bahwa untuk menentukan bupati dilihat dari seberapa banyak tim sukses memberikan uang. Selain itu, fasilitas yang ada di desa juga diperbaiki sebagaimana mestinya. Sedangkan 30,80% memilih tidak menerima uang dari tim sukses

karena yakin pada pilihannya. Dapat diartikan bahwa sebagian besar remaja desa Sumber Tanggul mau milih bupati tersebut karena adanya uang atau barang-barang yang telah diberikan. Selain itu, fasilitas yang ada di desa juga diperbaiki sebagaimana mestinya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan pada remaja agar tetap mempertahankan partisipasi politik demi kelangsungan demokrasi yang lebih baik lagi. Diharapkan faktor demokrasi yang sudah berkembang dapat berubah menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, Kunawi. 2011. *CIVIC EDUCATION (Pendidikan Kewarganegaraan)*. Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press.
- Budiardjo, Miriam. 1994. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Faturohman, Deden. 2002. *Ilmu Politik*. Malang : UMM Press
- Haryadi, Dodi. 2012. *Demokrasi Lokal (Evaluasi Pemilu pada di Indonesia)*. Jakarta : Kompas.
- Hidayat, Komaruddin. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan (CIVIC EDUCATION)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- KPU Kabupaten Mojokerto. DPT tahun 2010.
- Marlein, Marisa Fenyapwain. 2013. *Pengaruh Iklan Politik dalam Pemilu pada Minahasa terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Desa Tounalet Kecamatan Kakas*. Jurnal Ilmiah. Diakses tanggal 21 Februari 2013.
- Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
- Purwanto, Ngalim. 2010. *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rush, Michael & Philip Althoff. 1997. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ruslan, Ustman Abdul Muiz. 2000. *Pendidikan Politik Ikhwal Muslim*. Solo : Era Intermedia.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo
- Suryabrata, Sumadi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Susilo, Suko dkk. 2003. *Sosiologi Politik*. Surabaya : Yayasan Kampusina Surabaya.

Usman, Wan. 1997. *Pemerataan Pembangunan dan Ketahanan Nasional*. Kerjasama UT-UL Lumhannas.

Sumber dari Internet

<http://autore.seta.basri/pemilih-pemula/partisipasi-politik/>. Diakses tanggal 21 Pebruari 2013.

<http://dodi.supandi/pengertian-pendidikan-kewarganegaraan/>. Diakses tanggal 5 Maret 2013.

<http://hendrik.sapto/civic-education/>. Diakses tanggal 5 Maret 2013.

<http://oka.wisnumurti/partisipasi-politik-pemuda-dalam-pilkada/>. Diakses tanggal 21 Pebruari 2013.

<http://winarno.narmoaatmodjo/civi-education-untuk-indonesia/>. Diakses tanggal 5 Maret 2013.

Sumber dari Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD.

UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.32 tahun 2004.

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No.22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

